BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan mencari cara untuk mengatasi asalah-masalah tersebut agar negara berkembang dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.[1] Dalam hal ini, ekonomi pembangunan menjadi hal yang sangat penting sejak adanya perkembangan ekonomi yang besar antara negara-negara maju dengan negara berkembang.

Suatu negara dapat dikatakan makmur ketika pembangunan ekonominya berlangsung lancar. Makmur dalam arti pemenuhan sandang, pangan, papan masyarakatnya sudah mandiri, sehingga terwujudlah pembangunan ekonomi yang hakiki.[2] Tidak hanya di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi juga selayaknya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan nasional bisa dikatakan lancar bila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan. Hanya saja, pembangunan nasional di Indonesia hingga saat ini masih tampak mengalami ketimpangan. Satu wilayah terlihat maju, sementara wilayah lainnya terlihat jauh tertinggal.

Ada banyak faktor penyebab ketimpangan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum merata, diantaranya:

---

[1]Subandi. *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), hal. 9

[2]Didin S. Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2014), hal. 165

1. Ketimpangan pembangunan infrastruktur
2. Ketimpangan kualitas SDM
3. Ketimpangan sumber energi yang terpusat.

Dengan latar belakang masalah ini, maka terdapat tugas penting yang diemban pemerintah, yakni untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan ini. Salah satu strateginya adalah dengan menaruh porsi yang besar dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pemerintah pun telah menyadari betapa pentingnya upaya untuk melaksanakan pembangunan pedesaan akan mampu mendukung suksesnya pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Pembangunan ekonomi ini diarahkan pada pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Melalui berbagai program dari pemerintah, berbagai sumber daya ekonomi yang ada dapat diolah sedemikian rupa sehingga memberikan nilai tambah terhadap sumber daya yang ada. Pengolahan sumber daya ini merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan yang dijalankan.[3]

Dalam hal ini, pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang diamanatkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya desa dapat mendirikan badan usaha

---

[3]Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta: DEE Publish, 2012), hal. 5

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang mana kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.[4]

B. Optimalisasi Peran

1. Pengertian Optimalisasi Peran

Optimalisasi peran terdiri dari dua kata yaitu optimalisasi dan peran. Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal atau efektif. Optimalisasi berarti pengoptimalan.[5] Adapun pengertian menurut ahli optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya, atau dapat didefinisikan bahwa optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.[6]

Sedangkan pengertian peran menurut beberapa ahli diantaranya menurut Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

---

[4]Puguh Budiono, *Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor).* (Jurnal Politik Muda, 4 (1)., 2015), hal. 117

[5]Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), hal. 562.

[6]Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.4.

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.[7] Selanjutnya Maurice Duverger berpendapat bahwa peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan merupakan sebuah aspek dari status.[8] Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran adalah seperangkat tingkah laku seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem yang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar atau lingkup sekitarnya.

2. Konsep Optimalisasi

Seperti yang telah dijelaskan, optimalisasi merupakan upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber–sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas–batas tertentu secara efektif dan efisien. Setiap kegiatan usaha tentunya selalu berupaya untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya setiap kegiatan usaha selalu memiliki upaya atau strategi tersendiri dalam optimalisasi tujuannya tersebut. Seperti, misalnya dalam kegiatan pemasaran, strategi optimalisasi yang biasa dilakukan yaitu melakukan strategi pemasaran yang mencakup *price, place, product, dan promotion*. Sedangkan dalam organisasi atau kelembagaan, untuk mencapai optimalisasi dari tujuan organisasi atau kelembagaan yaitu dengan

[7]Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.212.

[8]Maurice Duverger, *Sosiologi Politik,* terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 102.

meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Di dalam suatu organisasi maupun lembaga tentunya memiliki asas atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan menjalankan perannya secara maksimal. Berikut ini ialah asas-asas organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan optimalisasi organisasi sehingga mampu menjadi organisasi yang unggul, efektif, dan berdaya guna sesuai kebutuhan:[9]

a) Asas tujuan organisasi, harus jelas dan rasional
b) Asas kesatuan tujuan, harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai
c) Asas kesatuan perintah, bawahan menerima perintah dan mempertanggungjawabkannya hanya kepada seorang atasan.
d) Asas rentang kendali, manajer hanya bisa memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 orang atau 9 orang.
e) Asas pendelegasian wewenang, pembagian wewenang harus jelas dan efektif.
f) Asas keseimbangan wewenang dan tanggungjawab, wewenang yang diberikan dengan tanggung jawab yang timbul karenanya harus sama besarnya.
g) Asas tanggungjawab, harus sesuai dengan garis wewenang.
h) Asas pembagian kerja
i) Asas penempatan personalia

[9]Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 8-9.

j) Asas jenjang berangkai, prosedur wewenang harus bersifat vertikal yang jelas, tidak terputus-putus dengan jarak pendek.

k) Asas efisiensi

l) Asas kesinambungan

m) Asas koordinasi

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mencapai optimalisasi dalam suatu lembaga atau organisasi maka diperlukan pengembangan kapasitas atau *capacity building,* yang mana pengembangan kapasitas ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.[10] Kapasitas adalah kemampuan organisasi atau *system* untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus menerus sehingga organisasi atau *system* tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal[11].

Seperti dalam kelembagaan BUMDes, dimana salah satu strategi yang perlu diambil dalam pengoptimalisasian kelembagaan yaitu dengan melakukan pengembangan kapasitas pada organisasi yang bertujuan untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan serta dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber perekonomian yang layak. Selain itu pengembangan kapasitas lembaga ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan

---

[10]Yeremias T. Keban, *Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2000), hal. 7.

[11]Bambang Santoso, dkk., *Capacity Building*, (Malang: UB Press, 2012), hal. 2

BUMDes yang dibentuk oleh masyarakat setempat agar mampu menjadi wahana bagi masyarakat mengembangkan kegiatan ekonominya.[12]

Secara umum konsep pengembangan kapasitas atau yang disebut *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Sedangkan menurut Simon Sumanjoyo dan Dedy Hermawan, pengembangan kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau sitem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus menerus.[13] Di sisi lain, Deasy Dwi Ratnasari, dkk mendefinisikan bahwa *capacity building* merupakan proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.[14]

---

[12]Mangku Purnomo, *Pembaruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2004), hal. 88

[13]Simon Sumanjoyo dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 7.

[14]Deasy Dwi Ratnasari, dkk., Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep), *Jurnal Administrasi Publik (JAP),* Vol. 1, No. 3, hal. 54.

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat diketahui bahwasanya pengertian mengenai *capacity building* memiliki makna yang sama yaitu pengembangan kapasitas merupakan upaya individu, organisasi atau sitem dalam memperkuat kemampuannya dengan tujuan agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara optimal. Oleh karena itu adanya pengembangan kapasitas sebagai upaya optimalisasi ini sangat penting. Kelembagaan yang kuat akan memberi jaminan kepastian bagi suatu usaha dalam menghadapi persaingan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga.

a. Dimensi *Capacity Building*

Pada dasarnya *capacity building* atau pengembangan kapasitas meliputi tiga dimensi yaitu:[15]

1) Mengembangkan *Human Resources* (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Sehingga manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi dan misi suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Pengembangan kapasitas SDM sangat penting baik bagi organisasi, individu, maupun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan

[15]Bambang Santoso, dkk., *Capacity Building*..., hal. 16-65

hubungan yang serasi antara berbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi.

2) *Strenghthening Organization* (Penguatan Organisasi)

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan prosedur aturan standar kerja tanggungjawab dan otoritas tertentu. Sebagai salah satu bentuk kehidupan, organisasi terikat dalam suatu proses keberadaan *(existence)*, pertumbuhan *(growth)*, dan perkembangan *(development)*. Dalam pertumbuhannya itu, organisasi menghadapi tuntutan-tuntutan besar yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan internal yang merupakan tuntutan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, maupun eksternal yang berasal dari perkembangan lingkungan di sekitar organisasi yang semakin hari semakin pesat.

Dengan adanya tuntutan-tuntutan tersebut, organisasi perlu dan secara terus menerus harus menentukan sikap yang kondusif untuk menghadapi tantangan yang menggetarkan eksistensinya. Dengan demikian pengembangan kapasitas diarahkan untuk memperkokoh kemampuan adaptasi suatu organisasi. Dalam upaya penguatan organisasi ini, hal-hal yang perlu diperhatikan terletak pada; pemanfaatan personil yaitu menempatkan pegawai/staff sesuai dengan kompetisinya,

pemanfaatan manajerial yaitu bagaimana mendesain struktur manajerialnya baik, dan pengembangan jaringan atau *network* dalam hal kerjasama dalam hal interaksi sosial.

3) *Institutional Reform* (Reformasi Kelembagaan)

Lembaga atau istitusi merupakan suatu organisasi yang memiliki ciri khusus yang memasukkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan normatif dari pada tindakan, serta melakukan fungsi dan jasa yang dipandang bernilai bagi lingkungannya. *Institutional Reform* sering dipertimbangkan sebagai konsep yang kabur, samar dan ini menimbulkan kesulitan untuk menentukan aspek-aspek yang paling penting dari kapasitas karena semua aspek terlihat sama pentingnya. Konsep kapasitas kelembagaan ini telah berevolusi selama bertahun-tahun dan merupakan sasaran yang terus berubah dari fokus pada pengembangan dan penguatan individu, organisasi, dan penyediaan teknik dan manajemen pelatihan guna mendukung perencanaan yang integral dan proses pembuatan keputusan antar institusi.

Fokus ini tengah berkembang lebih luas menyangkut juga pemberdayaan *(empowerment)*, modal sosial *(social capital)*, perkembangan lingkungan sesuai dengan budaya, nilai dan relasi kekuasaan yang mempengaruhi. Reformasi Kelembagaan berarti mengubah aturan permainan dimana organisasi dan individu membuat keputusan dan melakukan aktivitas-aktivitas. Reformasi Kelembagaan merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi

memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan.

Adanya banyak pendapat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilihat dari teori di atas bahwa dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi dan infrastruktur.[16]

b. Faktor yang Mempengaruhi *Capacity Building*

Di dalam pengembangan kapaitas sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, terdapat terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kapasitas yaitu: [17]

1) *Collective Commitments* (komitmen bersama) merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen ini tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan saja, namun meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Pengaruh komitmen bersama sangat besar, karena

[16]Jenivia Dwi Ratnasari, dkk., Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.3, hal. 105.

[17]*Ibid*, hal. 106

faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama.

2) *Conducive Leadership* (kepemimpinan yang kondusif) Adalah kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas. Dengan kepemimpinan yang kondusif seperti ini, maka akan menjadi alat pemicu untuk setiap elemen dalam mengembangkan kapasitasnya.
3) Partisipasi merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting karena menjadi dasar seluruh rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas. Partisipasi ini mencakup keseluruhan level, tidak hanya level staf atau pegawai saja, tetapi juga sampai level pimpinan.
4) Inovasi juga merupakan persyaratan lain yang tidak kalah penting mendesak. Inovasi sangat penting karena pekerjaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi justru bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan publik yang kian tinggi.[18]

C. Konsep Badan Usaha Milik Desa

1. Definisi BUMDes

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Sumpeno menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat

[18]Bambang Santoso, dkk., *Capacity Building...*, hal. 68-69.

yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.[19].

Di dalam suatu desa memiliki suatu lembaga atau badan usaha yang disebut dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUMDesa ini merupakan suatu pilar perekonomian bagi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa dalam Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Kalimat “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. Interpretasi sistem hukum

[19]Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan...*, hal. 2-3

terhadap peraturan perundangundangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (road map) pendirian BUMDes.[20]

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUMDes tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).[21] Pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.[22]

---

[20]Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa...*, hal. 26.

[21]*Ibid*, hal. 27-28.

[22]Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES.* (Jakarta : Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007), hal. 32.

Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa didirikannya BUMDes berdasarkan dari masyarakat dan potensi yang dikembangkan melalui sumber daya lokal dan adanya permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian, dikhawatirkan BUMDes tidak dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat di motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat yaitu sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa. Pada

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralilassi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintah yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Hal tersebut masuk ke dalam cakupan pembangunan ekonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.[23] Akar dari seluruh proses pembangunan adalah Desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya.

Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Budiono menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara

[23]Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 374

mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang diamanatkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang mana kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.[24]

2. Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

a) Meningkatkan perekonomian desa
b) Meningkatkan pendapatan asli desa
c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan

[24]Puguh Budiono, Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda,* Vol. 1, No. 4 tahun 2015, hal. 117.

cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.[25]

3. Landasan Hukum

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah: [26]

a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa"
b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

   Pasal 78

   1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

[25]Departemen Pendidikan Nasional..., hal. 5-6.
[26]*Ibid*, hal. 9-10.

2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: Pemerintah Desa, Tabungan masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pinjaman, dan/atau Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Bentuk badan hukum; b. Kepengurusan; c. Hak dan kewajiban; d. Permodalan; e. Bagi hasil usaha atau keuntungan; f. Kerjasama dengan pihak ketiga; g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

c. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 bahwa: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (3) BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Prinsip Tata Kelola

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:[27]

a) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.

b) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.

c) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.

[27]Edy Yusuf Agunggunanto, dkk., Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1, *2016*, hal. 70-71.

d) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.

e) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan.

f) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

D. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Konsep pengembangan ekonomi lokal memberi penekanan pada kekuatan untuk memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan yang terdapat dan dimiliki oleh lokal (daerah) untuk dimanfaatkan bagi tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengembangan ekonomi lokal didefinisikan sebagai terjalinnya kerjasama kolektif antara pemerintah, dunia usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya merangsang dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan.[28]

Potensi ekonomi daerah juga diartikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan

[28]Haniah Rahma, *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2012), hal. 17.

terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, swasta, dan kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki.

Prinsip utama yang mendasari konsep pengembangan ekonomi lokal diantaranya adalah sebagai berikut:[29]

a. Kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama yang dihadapi daerah sehingga strategi pengembangan ekonomi lokal harus memprioritaskan pada peningkatan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
b. Pengembangan ekonomi lokal harus menetapkan target pada masyarakat kurang beruntung pada area dan masyarakat yang cenderung termarjinalkan, pada usaha mikro dan kecil sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi nyata dalam kehidupan ekonomi setempat.
c. Setiap daerah perlu mengembangkan dan memiliki strategi sendiri yang sesuai dengan kondisi daerahnya.
d. Pengembangan ekonomi lokal mendukung kepemilikan lokal, keterlibatan masyarakat, kepemimpinan lokal, dan pengambilan keputusan bersama.

[29]*Ibid*, hal. 18

e. Pengembangan ekonomi lokal menuntut terbangunnya kemitraan antara masyarakat, sektor usaha dan swasta serta pemerintah untuk memecahkan masalah bersama.
f. Pengembangan ekonomi lokal memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, kemampuan, keterampilan, dan peluang bagi pencapaian berbagai tujuan.
g. Pengembangan ekonomi lokal memberikan keleluasaan bagi daerah untuk merespon perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Sasaran dan tujuan pengembangan ekonomi lokal antara lain:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah
b. Menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja
c. Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat
d. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain
e. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang positif antar daerah.

Adanya pengembangan ekonomi lokal merupakan proses untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi suatu wilayah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Pengembangan ekonomi lokal akan selalu memperhatikan potensi dan kondisi sumber daya lokal, dalam kaitan pemanfaatan aset ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, adanya suatu lembaga sangat dibutuhkan dalam rangka membantu pengelolaan dan pembangunan untuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang berpotensi

tinggi untuk tumbuh.[30] Potensi suatu wilayah harus mampu digali sesuai kondisi yang ada di daerah tersebut. Selain keadaan wilayah yang mendukung namun juga lingkungan sekitar harus diperhitungkan.

Secara umum pengembangan ekonomi lokal diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk. Sedangkan secara operasional pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya yang secara langsung dilakukan untuk membangun kekuatan ekonomi suatu wilayah tertentu untuk memperbaiki masadepan ekonomi dan kualitas penduduknya. Namun, suatu daerah tentunya memiliki kriteria yang berbeda dan lingkungan yang cepat berubah. Oleh karenanya, keberhasilan dari pengembangan ekonomi lokal sangat bergantung pada bagaimana adaptasi yang dilakukan terhadap perubahan lingkungan yang dinamis dan kompetitif.

Kemampuan dan kondisi yang khas dari suatu daerah akan menjadi faktor pendukung bahkan menghambat dari pengembangan ekonomi lokal itu sendiri. Untuk dapat memaksimalkan kemampuan dan mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan dan mengisi peluang ekonomi yang ada tersebut diperlukan proses kolaborasi yang mantap dari berbagai pihak. Dalam proses pengembangan ekonomi lokal ini pemerintah memegang peran yang penting. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan bisnis dan penciptaan lapangan pekerjaan. Salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu mengajak sektor privat

[30]Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 28-29.

dan masyarakat untuk bermitra dalam mengembangkan ekonomi lokal yang dimiliki suatu wilayah. Salah satunya melalui lembaga atau badan usaha.[31]

Pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal dapat diwujudkan melalui suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana badan usaha ini akan menggerakkan potensi yang ada di desa untuk dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Pengembangan BUMDes juga perlu dilakukan agar BUMDes yang berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran dari BUMDes sendiri akan dapat dicapai jika dikelola secara terarah dan profesional. Jika potensi ekonomi lokal yang ada di suatu desa mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan diperoleh hasil yang baik pula sehingga dapat menjadi pilar perekonomian masyarakat.[32]

Seperti upaya-upaya pengembangan lain yang dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan yang melalui tahapan dalam penerapannya, pengembangan ekonomi lokal juga memiliki empat tahapan utama yang berada dalam satu siklus pengelolaan yang berkelanjutan yaitu:[33]

1. Tahap I: Persiapan

   Tahap ini dimaksudkan sebagai tahap awal atau persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memulai menerapkan pendekatan pengembangan ekonomi lokal. Sebagian besar kegiatan dalam tahap ini

---

[31]Mas Roro Lilik Ekowati, *Kemitraan dalam Otonomi Daerah,* (Malang: Inteligensia Media, 2017), hal. 77-78.

[32]Coristya Berlian Ramadana, dkk, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 1, No. *6*, hal. 1069.

[33]Haniah Rahma, *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal*..., hal. 23-26.

terkait dengan penyiapan kelembagaan. Tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu:

a) Melakukan sosialisasi, penyebarluasan informasi, dan propaganda pendekatan pengembangan ekonomi lokal.
b) Membentuk organisasi pelaksana pengembangan ekonomi lokal di daerah atau desa.
c) Melakukan analisis terhadap kondisi pada saat itu.

2. Tahap II: Perencanaan

Sebelum memulai pada tahap pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal itu sendiri, daerah harus melalui tahap perencanaan. Tahap ini dimaksudkan agar daerah mampu merencanakan dengan baik dan tepat pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal. Langkah yang termasuk dalam tahapan ini yaitu:

a) Mengidentifikasi dan menentukan kluster ekonomi sebagai fokus pengembangan ekonomi lokal.
b) Membentuk dan mengembangkan forum kemitraan multi *stakeholder* pengembangan ekonomi lokal.
c) Merumuskan dan menyusun strategi, agenda program dan rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.
d) Memastikan terpenuhinya kondisi bagi keberhasilan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal.

3. Tahap III: Pelaksanaan

Tahap III adalah tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan seluruh strategi dan agenda program pengembangan ekonomi lokal yang telah ditetapkan pada tahap II. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini lebih ditujukan pada hal-hal yang sangat penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dalam proses pelaksanaan agenda program dan kegiatan yang terkait dengan tahapan sebelumnya. Sedangkan isi kegiatan dari setiap langkah pada tahap ini akan sangat fleksibel baik dari jenis dan volume kegiatan, tergantung pada strategi dan agenda program yang dipilih. Secara umum tahap pelaksanaan terdiri dari lima langkah yaitu:

a) Meningkatkan dan memperkuat kapasitas *stakehoder* daerah
b) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya investasi baru dan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah.
c) Mengembangkan, memperluas pasar dan melakukan promosi kluster ekonomi terpilih.
d) Memperkuat forum kemitraan pengembangan ekonomi lokal yang telah terbentuk.
e) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan dan ketrampilan produsen atau usaha dan pekerja berserta organisasinya.
f) Membangun kerjasama antar daerah baik secraa horizontal maupun vertikal.

4. Tahap VI: Monitoring dan Evaluasi

Walaupun diletakkan pada tahap akhir, kegiatan monitoring dan evaluasi tidak selalu harus diletakkan di akhir kegiatan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya kegiatan pengembangan ekonomi lokal merupakan siklus sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan sepanjang pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal. Tahap ini terdiri dari satu langkah yaitu membangun sistem dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

E. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi secara etimoligi berasal dari bahasa yunani yaitu Oikonomia. Oikanomia sendiri berasal dari dua suku kata yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Dengan demikian ekonomi sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurus rumah tangga yang dalam baha inggris disebut dengan istilah economics. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ekonomi adalah pengetahuan tentang pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.[34] Pengertian ekonomi secara umum memiliki arti yaitu, hal yang mempelajari perilaku manusia dalam mengembangkan sumberdaya yang langka, yang mana ruang lingkup

[34] Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2002), hal. 5

ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.[35]

Pengertian ekonomi menurut para ahli:[36]

1. Menurut Meyers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Menyers menekankan pada dua hal yaitu: pertama, tentang kebutuhan, yang merupakan keperluan manusia terhadap barang dan jasa yang beranekaragam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua, tentang pemuas kebutuhan yang berkarakteristik terbatas ketersediaannya.
2. J.L. Meij mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis, karena ditinjau dari aspek ekonomi dimana manusia sebagai makhluk ekonomi hakekatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi.
3. Samuelson dan Nordhaus mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternative penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, kepada berbagai individudan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

---

[35]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 14

[36]Basuki Pujo Alwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 12-13.

4. Menurut Abdullah, ilmu ekonomi sebagai bagian ilmu sosial, jelas bertautan dengan disiplin bidang ilmu akademis lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Hal ini berarti kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik. Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, artinya juga mengkaji peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.

Apa yang telah dikatakan oleh beberapa pandangan di atas, meskipun terjadi perbedaan dalam cara pengungkapannya, namun terlihat bahwa pada hakekatnya ilmu ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diinginkan, melalui pilihan dalam menggunakan sumber daya yang bersifat langka dan terbatas. Dengan demikian, secara sederhana dapat dimakanai bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia.

Sedangkan pengertian masyarakat, dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal kata socius yang berisi kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak yang artinya bergaul. Hal ini dikarenakan ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan.[37]

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L. Gillin dan J.P.Gillin dalam bukunya M. Munandar Soelaeman sepakat bahwa adanya

[37]M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial* , (Bandung: Refika Aditama, 1998), h. 63.

saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.[38] Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai kesamaan isi, yaitu bahwa masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusis yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia baru. Selain itu sebagai akaibat dari hidup bersama itu, timbullah sistem kominukasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dalam arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial,mempunyai ikatanikatan kasih sayang yang erat.selanjutnya, kesatuan sosial

[38]*Ibid*, hal. 65

mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dansebagainya. Jiwa masyarakat ini merupakan polusi yang berasal dari unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peran sosial.

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini mausia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan mahluk hidup lain seperti hewan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, suatu misal manusia yang dikurung sendirian di dalam suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehinga lama-kelamaan dia akan mati.[39]

Kemantapan unsur-unsur masyarakat mempengaruhi setruktur sosial. Dalam hal ini struktur sosial digambarkan sebagai adanya molekul dalam susunan yang membentuk zat, yang terdiri dari bermacam-macam susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Maka terjadi integrasi masyarakat dimana tindakan individu dikendalikan, dan hanya akan nampak bila diabstrakkan secara induksi dari kenyataan hidup masyrakat yang kongkrit. Dapat dijelaskan bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu kebutuhan bagi masyarakat yang dimana masyarkat tersebut mendiami suatu desa atau tempat tinggal dengan jangka waktu yang lama dan memiliki kebudayaan yang sama,

[39]Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 26-27

serta memiliki kebutuhan hidup yang sama yang sama-sama membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk produksi ataupun dalam bentuk distribusi yang dibutuhkan manusia.

Di Indonesia, yang menjadi landasan sitem ekonomi yaitu yang mengandung aspek etik dan moral luhur, dengan menempatkan masyarakat pada kedudukan yang mulia, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai hamba Tuhan, dimana hidup dalam relasi dengan berbasis modal sosial berupa tolong menolong dan gotong royong. Seperti kehidupan ekonomi masyarakat di desa. Tujuan utama dari kehidupan masyarakat desa yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. Dalam sistem perekonomian masyarakat desa ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat berpengaruh kuat.[40]

Namun, tentunya sistem ekonomi ini tidak akan dapat berdiri sendiri. sistem ekonomi merupakan sitem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.[41] Dalam hal ini kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi dasarnya. Kelembagaan ekonomi di desa berfungsi untu menggerakkan sumber-sumber agraria yang dimiliki suatu desa dapat dimanfaatkan bersama-sama secara adil dan maksimal. Karena itu, sangat mutlak untuk menciptakan kondisi yang dapat mendorong munculnya prakarsa dan peran-serta masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan

---

[40]Basuki Pujo Alwanto, *Perekonomian Indonesia...,* hal. 59
[41]*Ibid*, hal. 57-58

hak-hak ekonomi, sosial, politik dalam rangka peningkatan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.[42]

Pada kenyataan selama ini kelembagaan ekonomi di desa tidak memberi keadilan terutama bagi kelompok kecil. Hal tersebut menjadi tantangan yaitu bagaimana lembaga sosial ekonomi ini mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya ekonomi secara optimal dan memberikan pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Ini artinya bahwa lembaga ekonomi desa tidak semata-mata adalah lembaga bisnis namun sebagai bagian dari budaya lokal, sehingga hak masyarakat terjamin dalam lembaga ekonomi tersebut.[43]

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut adalah:[44]

1) *Invistible Resources*

Maksud dari *Investable Resouces* adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Sumber daya alam harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam untuk

---

[42]Mangku Purnomo, *Pembaruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa...*, hal. 85-86

[43]*Ibid*, hal. 87.

[44]Almizan, Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam,*Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 207-212.

dimanfaatkan sebesar-besarnya agar bisa menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya.

2) *Human Resources*

Tingginya kebutuhan akan SDM berkualitas dalam pengembangan ekonomi harus bisa diatasi melalui program pendidikan yang terencana dengan baik, selain itu peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai ekonomi sejak dini tentang semangat berbagi misalnya, akan melahirkan generasi atau sumber daya manusia yang baik dan berkompeten. Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional.

3) *Technology* dan inovasi

Faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. *Technological progress* disadari merupakan faktor yang dapat mengakselarasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Setiap karya itu pada

dasarnya lahir dari sebuah inovasi dan kreativitas. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif. Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan.

Dinamika dan diskontiniuitas tersebut berkaiatan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal sebagai Pilar Perekonomian Desa dalam berbagai

karyanya baik dalam bentuk buku maupun jurnal, serta beberapa penelitian yang masih memiliki kaitan dengan tema dalam penelitian ini.

1. Prayudi, [45] penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penguatan pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian desa dan pengaruh optimalisasi peran BUMDes terhadap kemandirian desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penguatan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa; dan (2) Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yang sama yaitu pada BUMDes. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang dipakai yaitu pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif.
2. Ribawanto,[46] penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan Kampoeng Ekowisata Desa Bendosari yang mengusung konsep tradisional dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai

[45]Ni Luh Putu A. D. P., Made A. W., dan Made A. P., Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes untuk Kemandirian Desa Pada Desa Di Kabupaten Jembrana, e-*Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8 No: 2 Tahun 2017.

[46]Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, dan Heru Ribawanto, Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, tahun 2014.

manajemen pengelola. Pemerintah Desa Bendosari berupaya untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) dari seluruh elemen yang terlibat dalam pengembangan ekowisata melalui program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan potensi Kampoeng Ekowisata Bendosari yang digagas oleh Pemerintah Desa dengan menerapkan strategi capacity building dari seluruh elemen yang terlibat sebagai pengelola ekowisata yaitu Pemerintah Desa, masyarakat lokal dan juga organisasi lokal. Dalam pengembangan Kampoeng Ekowisata Bendosari, juga dapat menghasilkan manfaat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya infrastruktur desa, dan meluasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai strategi optimalisasi dengan menggunakan pengembangan kapasitas atau *capacity building* serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif . Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah pemerintah desa, sedangkan objek penelitian ini adalah BUMDes.

3. Winarna,[47] penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kontribusi BUMDes bagi penguatan ekonomi dengan menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaan pendampingan dana desa yang dilakukan di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu terdapat lima unit usaha pada BUMDes tersebut dan terdapat kendala yang terjadi atau dalam artian peran BUMDes disini belum dapat optimal sehingga penulis memberikan solusi berupa strategi pelatihan yaitu dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, implementasi, dan pendampingan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang dilakukan peneliti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif . Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada analisis peran BUMDes melalui factor penghambat dan pendukung sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dengan menganalisis strategi optimalisasi BUMDes.
4. Aidar,.[48] penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan Desa Ponggok, Kecamatan Pulungharjo, Klaten, Jawa Tengah dalam mengelola sumber daya alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan optimal sehingga menjadi desa ini sebagai desa yang mandiri dan sejahtera yang

[47]Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, F., dan Jaka Winarna, Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 16, tahun 2016.

[48]Ummi Zakiyah, dan Aidar, Strategy of Natural Resources Management of Ponggok Village, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Alam*,Vol. 2, No. 2, tahun 2017.

dapat menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai strategi yang dilakukan Desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah pemerintah desa, sedangkan objek penelitian ini adalah BUMDes.

5. Suwondo,[49] penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai faktor pendukung dan penghambat BUMDes dalam upaya memperkuat perkonomian desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari peneltian tesebut menjelaskan bahwa BUMDes tersebut tidak menyokong pendapatan desa dikarenakan operasional bidang usaha BUMDes tidak berjalan dengan baik sehingga keberadaan BUMDes tidak memiliki eksistensi dan perannya secara optimal. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai peran BUMDes sebagai pilar perekonomian desa serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada analisis peran BUMDes melalui factor penghambat dan pendukung sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dengan menganalisis strategi optimalisasi BUMDes.

[49]Coristya Berlian Ramadana, dkk, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 1, No. 6.

6. Rozikin,[50] dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng ini sudah ada upaya melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*) meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, partisipasi anggota dan diversifikasi usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif Spradley. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak optimalisasi peran yaitu pada jumlah dan aktivitas anggota, pengembangan usaha, sisa hasil usaha (SHU) dan lingkungan sekitar. Keberadaan Koperasi Wanita ini belum optimal karena belum mencakup semua penduduk perempuan di Kecamatan Kota Sumenep, tidak ada regenerasi ketua koperasi dan toko hanya untuk anggota. Dalam hal ini masih perlu ditekankan pada pengembangan anggota melalui diklat/studi banding dan lingkungan yaitu usaha toko selain anggota juga untuk umum. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai strategi optimalisasi dengan menggunakan pengembangan kapasitas atau *capacity building* serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif . Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengenai objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah pada koperasi wanita, sedangkan objek penelitian ini adalah BUMDes.

[50]Deasy Dwi Ratnasari, dkk., Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep), *Jurnal Administrasi Publik (JAP),* Vol. 1, No. 3